

ANALISIS KESIAPAN KONTRAKTOR LOKAL PAPUA DALAM MENGHADAPI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) VERSI 4**Slamet Widodo^{1*}, Faried Desembardi², Hendrik Pristianto³, Nery Maria Wondal⁴**^{1,2,3,4} Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong

Jalan Pendidikan No 27, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

*Email: slametwido2810@gmail.com

Abstrak

Dengan dilaksanakannya Otonomi Khusus sejak tahun 2001, Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Barat, Pasar Tunggal ASEAN 2015 serta belum meratanya kualitas SDM Konstruksi pada kontraktor lokal Papua, dan saat ini ditambah lagi dengan pembaharuan teknologi dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka kontraktor lokal Papua harus menyiapkan diri menghadapi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan kontraktor lokal Papua dalam menghadapi SPSE versi 4. Penelitian dilaksanakan dengan wawancara kepada kontraktor lokal Papua di wilayah Kabupaten dan Kota Sorong. Model yang digunakan untuk menganalisa adalah model ELR Aydin & Tasci yang umum dipakai mengukur kesiapan penerapan e-learning yang dalam penelitian ini akan diadopsi untuk mengukur kesiapan kontraktor lokal dalam penerapan SPSE. Hasil penelitian didapatkan rerata skor penilaian kepada deskripsi responden terhadap jawaban responden saat wawancara yaitu 2,288 yang diinterpretasikan bahwa nilai tersebut berarti masuk kategori tidak siap dan membutuhkan banyak peningkatan. Artinya adalah bahwa kontraktor lokal Papua tidak (belum) siap menghadapi penerapan sistem pelelangan melalui aplikasi SPSE versi 4, dan untuk menjadi siap maka dibutuhkan banyak peningkatan. Dimana seharusnya nilai minimal dari rerata skor penilaian adalah 3,41 untuk masuk kategori siap.

Kata kunci: kesiapan, kontraktor lokal Papua, SPSE4

1. PENDAHULUAN

Di era otonomi khusus bagi Papua yang dimulai pada tahun 2001, mempunyai konsekuensi bahwa pembangunan konstruksi di daerah Papua meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Dan dengan semangat otonomi khusus, pada saat ini juga telah tumbuh berkembang berbagai badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan jasa konstruksi. Namun, peningkatan jumlah badan usaha ini belum disertai dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga kualitas/mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, moral dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi sedang dihadapi oleh kontraktor lokal/pengusaha putra Papua untuk mengembangkan usahanya adalah belum adanya SDM yang khusus mengelola administrasi keuangan, kurangnya kesempatan mendapat pekerjaan, jumlah ketersediaan SDM bidang Konstruksi di Papua Barat kurang/terbatas dan dalam penentuan harga material lokal aturan adat lebih mendominasi daripada hukum/peraturan pemerintah daerah, sehingga dinamika pasar kurang bisa dikendalikan oleh Pemerintah Daerah setempat (Pristianto, 2012).

Pristianto, (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa : (a) Belum ada kebijakan resmi / tertulis yang mengatur pengelolaan sektor konstruksi di Propinsi Papua Barat, dan (b) Kebijakan pemerintah pusat belum dianggap efektif baik untuk percepatan pembangunan maupun untuk mendorong kesiapan pelaku usaha sektor konstruksi di Propinsi Papua Barat untuk bersaing dalam Pasar Tunggal ASEAN 2015.

Terkait kesiapan menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 didapat data bahwa 64% responden menyatakan siap untuk menghadapi pasar bebas mulai tahun 2015 sedangkan yang menjawab belum siap sebesar 10% dan yang menyatakan tidak siap sebesar 4%. Bagi yang menyatakan siap memberikan alasan 47% optimis dengan sumberdaya yang mereka miliki yaitu berupa keahlian (skill) dan 38% menyatakan bahwa dibalik kesiapannya masih membutuhkan suatu persiapan khusus untuk meningkatkan keahlian yang mereka miliki saat ini (Pristianto, 2014).

Secara konvensional, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan secara fisik pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Kelebihan yang didapat dari sistem ini adalah para pengguna dan penyedia barang/jasa dapat secara bersama-sama mendiskusikan tentang transaksi yang akan dilakukan. Tetapi kelemahannya metode pengadaan konvensional dipandang dapat menimbulkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pada Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, di butir ke-4 disebutkan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan e-procurement pada semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) telah mengembangkan aplikasi e-procurement yang bernama SPSE (Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik) untuk digunakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Instansi Pemerintah seluruh Indonesia. Saat ini terdapat SPSE versi 4 yang menggantikan versi sebelumnya. LKPP RI telah mengembangkan aplikasi SPSE versi 4.1.2. untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah lebih cepat, efisien dan aman. Terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga mempermudah dalam perencanaan dan pendokumentasian proses e-tendering dan e-purchasing. Pada SPSE terbaru terdapat fitur-fitur yang tidak tersedia pada versi sebelumnya. Ditengarai terdapat semangat untuk untuk membangun aplikasi yang mendukung pelaksanaan tender atau lelang paket pekerjaan pemerintah dengan lebih cepat, mudah, sistematis, efisien, aman dan diharapkan mampu meminimalkan timbulnya kecurangan-kecurangan. Penyedia jasa juga dimudahkan dan bisa lebih cepat melakukan penawaran, namun juga dituntut untuk lebih memahami proses pemasukan dokumen penawaran secara cermat melalui aplikasi SPSE Versi 4, karena sifat sistem yang otomatis melakukan evaluasi dan koreksi aritmatik.

Nightsabha dkk (2009) menyebutkan bahwa di Kota Yogyakarta terjadi perbedaan persepsi antara kedua kelompok pengguna sistem e-procurement yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan sikap dalam menghadapi perubahan sistem pengadaan dari konvensional ke sistem baru e-procurement sehingga mempengaruhi tindakan masing-masing dalam pemahaman dan penggunaan sistem tersebut. Perbedaan persepsi tersebut membawa dampak berupa kesenjangan digital antar pengguna sistem e-procurement. Kesenjangan digital dalam implementasi e-procurement bukanlah masalah sederhana yang dapat dibiarkan begitu saja.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Khusus sejak tahun 2001, Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Barat, Pasar Tunggal ASEAN 2015 serta belum meratanya kualitas SDM Konstruksi pada kontraktor lokal Papua, dan saat ini ditambah lagi dengan pembaharuan teknologi dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka kontraktor lokal Papua harus menyiapkan diri menghadapi hal tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan kontraktor lokal Papua dalam menghadapi SPSE versi 4.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. (Kuntjojo, 2009)

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota dan Kabupaten Sorong. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kontraktor lokal Papua. Adapun yang dimaksud sebagai Kontraktor Lokal Papua atau Pengusaha Lokal sesuai dengan pasal 1 Perpres 84 tahun 2012 adalah penyedia barang/jasa yang merupakan/dimiliki orang asli papua dan berdomisili/berkedudukan di Propinsi Papua atau Propinsi Papua Barat.

2.3 Instrumen Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini digunakan instrumen yaitu angket atau kuisioner adalah instrumen penelitian yang dibuat dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berupa laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Penyebaran angket/kuisioner bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai suatu masalah dimana responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan (Anonim, 2016). Instrumen penelitian yang kedua ini dipakai untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi kesiapan kontraktor lokal Papua dalam mengikuti SPSE versi 4.

Format pertanyaan dalam wawancara kepada responden adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman secara umum tentang SPSE 4
2. Perusahaan terdaftar / tidak pada SPSE
3. Keikutsertaan perusahaan dalam pelatihan aplikasi SPSE
4. Ada/tidaknya operator SPSE dalam perusahaan yang khusus menangani aplikasi SPSE 4
5. Pemahaman terhadap mekanisme memperoleh dokumen pengadaan pada aplikasi SPSE 4
6. Pemahaman terhadap perbedaan mekanisme membuat dokumen pengadaan pada aplikasi SPSE 3 dan SPSE 4
7. Pemahaman tentang token pada aplikasi SPSE 4
8. Pemahaman terhadap perbedaan appendo pada aplikasi SPSE 3 dan token pada aplikasi SPSE 4
9. Pemahaman terhadap mekanisme upload dokumen penawaran pada SPSE 4
10. Pemahaman secara detail tentang perbedaan mekanisme pelelangan melalui aplikasi SPSE 3 dan aplikasi SPSE 4

Sedangkan deskripsi jawaban responden terhadap ke-10 pertanyaan di atas dinilai dalam lembar penilaian oleh peneliti lapangan (surveyor). Konsep penilaian surveyor terhadap deskripsi jawaban responden akan diuraikan pada subbab teknik analisa data.

Model yang digunakan adalah model ELR Aydin & Tasci untuk mengukur kesiapan penerapan *e-learning* yang dalam penelitian ini akan diadopsi untuk mengukur kesiapan kontraktor lokal dalam penerapan *e-procurement* atau SPSE. Model ELR Aydin & Tasci sudah dikembangkan serta disesuaikan agar dapat digunakan dalam penelitian ini. Model ELR Aydin & Tasci menggunakan empat faktor kesiapan.

Model ini akan memberikan skor tingkat kesiapan. Model ELR Aydin & Tasci dikembangkan untuk institusi-institusi di negara berkembang, sehingga cocok jika digunakan di Indonesia. Faktor-faktor dari model ELR Aydin & Tasci ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini (Kurniawan, 2014).

Tabel 1. Faktor ELR dari model ELR Aydin & Tascii yang telah disesuaikan

	Sumber Daya	Keterampilan	Sikap
Teknologi	Akses ke komputer dan internet	Kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet	Sikap positif terhadap penggunaan teknologi <i>e-procurement</i> (SPSE)
Inovasi	Kendala dalam pengadopsian <i>e-procurement</i> (SPSE)	Kemampuan untuk mengadaptasi perubahan (pembaharuan/inovasi)	Keterbukaan terhadap pembaharuan (inovasi)
Manusia	Kontraktor lokal papua	Kemampuan untuk belajar melalui / dengan <i>e-procurement</i> (SPSE)	Kerjasama antar kontraktor dalam menggunakan <i>e-procurement</i> (SPSE)
Pengembangan diri	Anggaran internal untuk <i>e-procurement</i> (SPSE)	Kemampuan untuk memajemen waktu	Kepercayaan terhadap pengembangan diri

Berdasarkan tabel di atas, faktor manusia dari sisi sumber daya dan sikap, faktor inovasi dari sisi sumber daya, serta faktor pengembangan diri dari sisi sumber daya telah mengalami penyesuaian. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil pengukuran kesiapan penerapan *e-procurement* (SPSE) yang lebih optimal.

Skor dalam penerapan model ini yang sudah diketahui akan dievaluasi faktor mana yang masih lemah ataupun yang sudah siap dalam penerapan *e-procurement* (SPSE).

2.4 Teknik Sampling dan Analisis Data

Dalam proses pengumpulan data, dilakukan pengambilan sampel dari populasi yaitu kontraktor lokal Papua di wilayah Sorong. Sebagai acuan maka diambil teori Krejct dan Morgan yang telah memberikan tabelnya yang dikenal dengan tabel **Krejct & Morgan**.

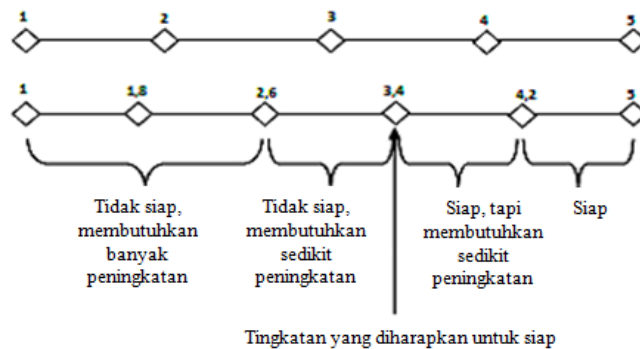
Setelah semua data responden terkumpul, dilakukan analisis menggunakan model ELR Aydin & Tasci. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2014):

1. Skor yang digunakan dalam lembar penilaian yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk tiap pertanyaan. Setelah lembar penilaian diisi oleh peneliti lapangan (surveyor) akan diperoleh skor total, selanjutnya dihitung rata-rata akhir dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan : \bar{x} = rata-rata akhir; $\sum x$ =jumlah skor total; N=jumlah responden

2. Skor rata-rata dari setiap pertanyaan, skor rata-rata pertanyaan untuk satu faktor yang sama dan skor rata-rata total dari semua pertanyaan akan dinilai menggunakan skala penilaian model ELR Aydin & Tasci. Skala penilaian tersebut berupa empat kategori yaitu siap dan penerapan *e-learning* dapat dilanjutkan, siap tetapi membutuhkan sedikit peningkatan, tidak siap dan membutuhkan sedikit peningkatan, serta tidak siap dan membutuhkan banyak peningkatan. Skala penilaian tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skala penilaian model Aydin & Tasci

Skor rata-rata 3,41 merupakan skor minimal untuk tingkat kesiapan penerapan *e-procurement* (SPSE), sehingga $\bar{x}_{slr} = 3,41$ yang berarti skor rata-rata dari tiap pertanyaan, skor rata-rata pertanyaan untuk satu faktor sama dan skor rata-rata total dari semua pertanyaan harus $\bar{x} > \bar{x}_{slr}$ untuk dapat dianggap siap dalam penerapan *e-procurement*. Untuk rentang nilai dan kategori seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rentang nilai dan kategori model Aydin&Tasci

Rentang Nilai	Kategori
$1 \leq \bar{x} \leq 2,6$	Tidak siap, membutuhkan banyak peningkatan
$2,6 \leq \bar{x} \leq 3,4$	Tidak siap, membutuhkan sedikit peningkatan
$3,4 \leq \bar{x} \leq 4,2$	Siap, tetapi membutuhkan sedikit peningkatan
$4,2 \leq \bar{x} \leq 5$	Siap

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Persiapan Penelitian Lapangan

Keberadaan kontraktor lokal Papua dalam asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi berada di bawah pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan dibawah asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) cabang Sorong. Di dalam metode penelitian telah dijelaskan bahwa lokasi penelitian ini adalah terfokus pada wilayah Kota dan Kabupaten Sorong, yang artinya bahwa kontraktor lokal Papua yang diteliti kesiapannya dalam penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) versi 4 adalah kontraktor lokal Papua yang terdaftar di Gapensi berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong. Dari hasil penelusuran data di GAPENSI dan website LPJK, didapatkan seperti pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 3. Data Kontraktor di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong

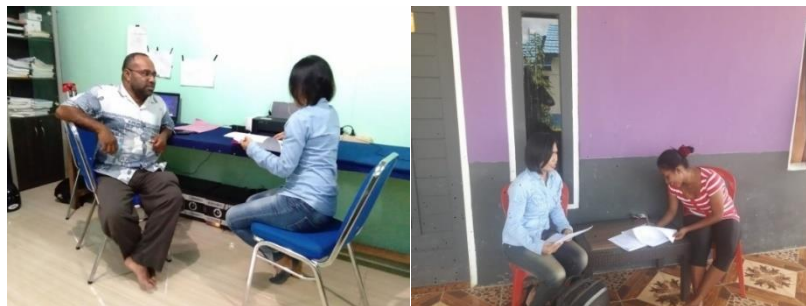
Uraian	Kontraktor Lokal Papua	Kontraktor Non Papua	Jumlah Total
Data Kontraktor	45 perusahaan	212 perusahaan	257 perusahaan

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi target penelitian adalah ke-45 perusahaan / kontraktor lokal Papua. Pada pelaksanaan penelitian, disiapkan instrumen penelitian berupa (1) Format wawancara berisi 10 pertanyaan yang menjadi panduan bagi responden untuk mendeskripsikan kondisi perusahaannya, dan (2) format penilaian yang merupakan pegangan dari surveyor/peneliti untuk menilai deskripsi yang diberikan secara lisan oleh responden terhadap point-point pertanyaan yang ada di form wawancara. Point-point pertanyaan dalam format wawancara yang harus diisi responden dan konsep penilaian dari deskripsi responden terhadap pertanyaan responden dapat dilihat dan sudah diuraikan pada bagian instrumen penelitian.

3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian Lapangan

Surveyor/ peneliti lapangan di bawah koordinasi dengan Tim Peneliti (Ketua dan Anggota) secara bertahap melakukan pendekatan kepada kontraktor lokal Papua yang telah teridentifikasi sebagai obyek penelitian sebagaimana ditampilkan di tabel 3.

Setelah diketahui 45 perusahaan yang menjadi obyek penelitian, maka pengambilan data oleh surveyor /peneliti lapangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kendala yaitu alamat yang tertera dalam website LPJK, banyak yang hanya untuk dicantumkan saja saat registrasi. Sedangkan ketika pelaksanaan penelitian, beberapa perusahaan tidak berdomisili pada alamat tersebut. Setelah berkoordinasi dengan pihak GAPENSI, untuk yang tidak bisa ditemui di alamat tersebut maka disarankan untuk mencari dan menemui mereka di kantor-kantor Dinas Pemda Kabupaten Sorong disaat mereka sedang mengurus paket-paket perkerjaan yang sedang ditangani. Dibawah ini beberapa foto dokumentasi kegiatan penelitian.



Gambar 2. Dokumentasi penelitian di kantor/domisili responden

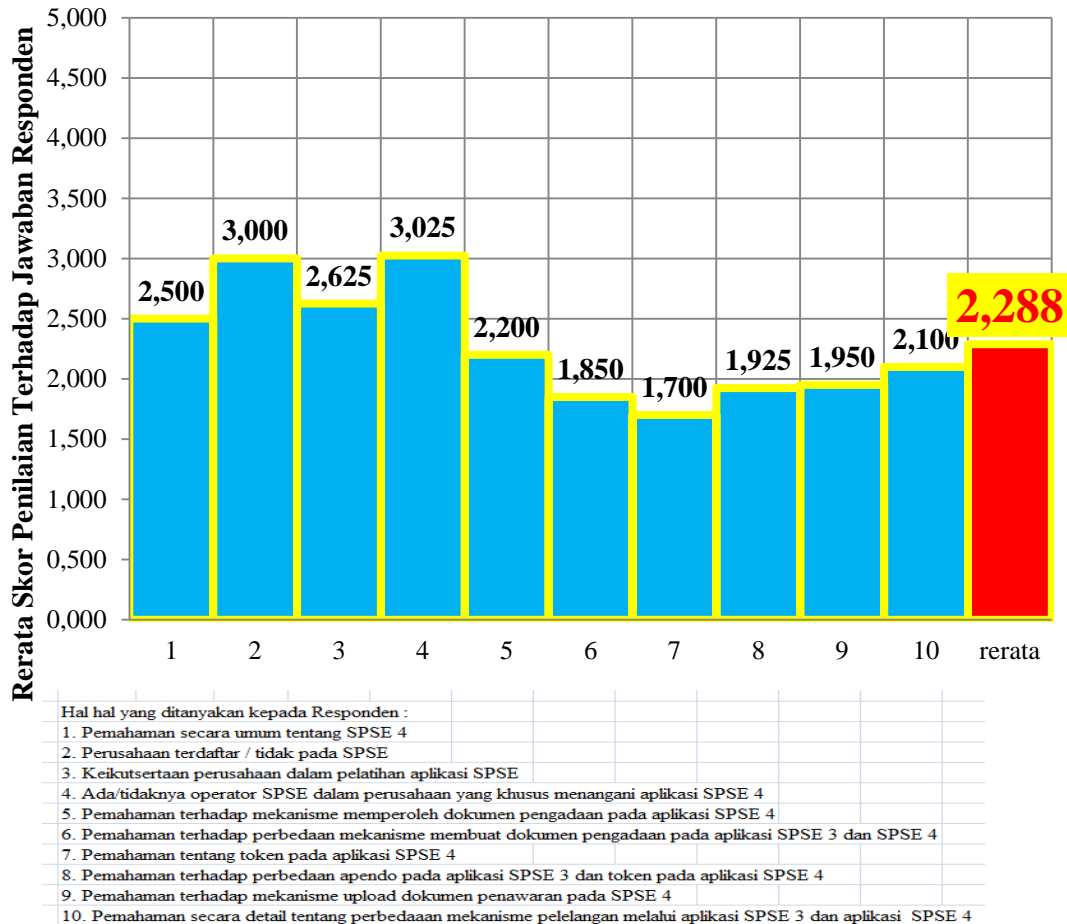


Gambar 3. Dokumentasi penelitian di luar domisili responden (di kantor Dinas PU Kabupaten Sorong dan di kantin kompleks kantor Dinas PU Kabupaten Sorong)

Populasi penelitian adalah 45 kontraktor lokal Papua sesuai dengan data dari DPC GAPENSI Sorong dan dengan menggunakan tabel **Krejict & Morgan** maka didapat sampel penelitian adalah sebanyak 40 responden.

3.3. Tahap Analisa dengan Menggunakan Model ELR Aydin & Tasci

Grafik pada gambar 4 di bawah ini menunjukkan hasil penilaian peneliti terhadap jawaban responden dari 10 pertanyaan yang diajukan. Skor-skor yang muncul kemudian dianalisa menggunakan model ELR Aydin & Tasci.



Gambar 4. Deskripsi Hasil Penelitian Menggunakan model ELR Aydin & Tasci

Dari gambar 1 sebelumnya telah diketahui bahwa skor rata-rata 3,41 menurut model ELR Aydin & Tasci merupakan skor minimal untuk tingkat kesiapan penerapan *e-procurement* (SPSE), sehingga $\bar{x}_{str} = 3,41$ yang berarti skor rata-rata dari tiap pertanyaan, skor rata-rata pertanyaan untuk satu faktor sama dan skor rata-rata total dari semua pertanyaan harus $\bar{x} > \bar{x}_{str}$ untuk dapat dianggap siap dalam penerapan *e-procurement*. Sedangkan dari gambar 4, diketahui bahwa nilai rerata skor penelitian terhadap 40 responden kontraktor lokal Papua adalah sebesar 2,288. Nilai rerata sebesar 2,288 tersebut di-interpretasikan terhadap tabel 2 untuk mendapatkan kategori tingkat kesiapan, dan dengan nilai $2,288 = (1 \leq \bar{x} \leq 2,6)$ maka didapatkan kategori adalah **Tidak siap, membutuhkan banyak peningkatan**. Artinya adalah kontraktor lokal Papua **tidak (belum) siap menghadapi penerapan SPSE versi 4, dan untuk menjadi siap maka dibutuhkan banyak peningkatan**.

Level atau kategori ini merupakan kategori terendah dalam model ELR Aydin & Tasci, sehingga perlu di analisa lebih lanjut terhadap ke-empat faktor penentu kesiapan menurut model tersebut yaitu faktor teknologi, faktor inovasi, faktor manusia dan faktor pengembangan diri. Keempat faktor tersebut diinterpretasikan terhadap 3 sisi yaitu sisi sumberdaya, sisi keterampilan dan sisi sikap. Dan kemudian dianalisa rata-rata skor pada setiap faktornya sehingga dapat dimunculkan langkah langkah perbaikan dan peningkatannya. Hal ini penting, karena dalam kategori yang muncul dari metode ini adalah tidak (belum) siap dan membutuhkan banyak peningkatan. Analisa per-faktor dan rekomendasi perbaikan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Analisa Skor Penilaian per faktor dan saran Perbaikan

Faktor yang dianalisa	Rerata Skor	Kategori menurut Model ELR	Skor minimum	Deviasi	Saran Perbaikan / Peningkatan
Teknologi - Sumberdaya	3,025	Tidak siap, membutuhkan sedikit peningkatan	3,41	-0,385	Semua kontraktor lokal Papua harus mempunyai operator khusus yang mahir dalam bidang teknologi informasi (internet) untuk menangani pelelangan pekerjaan melalui SPSE 4.
Teknologi - Sikap	2,883			-0,527	Semua kontraktor lokal Papua harus menyadari pentingnya penggunaan dan penguasaan teknologi informasi, khususnya terkait penguasaan teknologi SPSE dalam upaya memenangkan tender/pelelangan
Manusia - Keterampilan	2,825			-0,585	Semua kontraktor lokal Papua harus mempunyai operator SPSE dan harus diikutsertakan dalam pelatihan penguasaan aplikasi SPSE 4
Manusia - Sikap	2,825			-0,585	Perlunya kegiatan secara berkala dengan deseminasi materi dan praktek SPSE versi 4 khususnya di internal asosiasi bagi para operator SPSE, misal diadakan oleh DPC Gapensi Sorong
Pengembangan - Sikap	2,825			-0,585	Perlu dibangun kepercayaan diri bahwa dengan dipenuhi sumberdaya yang minimal harus ada yaitu misalnya operator yang khusus menangani pelelangan melalui SPSE, maka semua akan memiliki kesetaraan dalam kesempatan dan meraih peluang
Pengembangan Diri - Keterampilan	2,650			-0,760	Kontraktor lokal Papua khususnya harus memperhatikan konsep manajemen waktu dalam mengikuti pelelangan melalui SPSE, sehingga tidak ada yang terlewat tahapan tahapannya.
Inovasi - Keterampilan	2,625			-0,785	Penerapan SPSE versi 4 ini adalah perubahan yang harus diikuti oleh kontraktor lokal Papua, sehingga perlu meningkatkan kesiapan SDM nya. Harus ada staff perusahaan yang khusus menangani pelelangan melalui SPSE
Pengembangan Diri - Sumb	2,608			-0,802	perlu peningkatan alokasi anggaran dari perusahaan untuk pengelolaan pelelangan yang akan diikuti, khususnya untuk penyiapan SDM dan sarana teknologi informasi yang dimiliki perusahaan
Manusia - Sumberdaya	2,288	Tidak siap, membutuhkan banyak peningkatan		-1,123	Semua unsur dalam perusahaan /kontraktor lokal Papua harus bersinergi. Unsur pimpinan dan staf harus menyesuaikan diri dengan seluruh sistem dalam pelelangan melalui SPSE versi 4. kekurangan kekurangan yang selama ini ada, maka harus segera di penuhi untuk peningkatan kapasitas perusahaan
Teknologi - Keterampilan	2,145			-1,265	Penguasaan teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini, keberadaan operator di perusahaan yang khusus menangani masalah pelelangan
Inovasi - Sikap	2,125			-1,285	kontraktor lokal Papua diharapkan meningkatkan aktifitas keikutsertaan dalam pelatihan pelatihan khususnya yang ada kaitanya dengan update informasi tentang sistem pelelangan
Inovasi - Sumberdaya	1,992			-1,418	Pemahaman secara detail terhadap perubahan perubahan sistem pelelangan sangat perlu dikuasai oleh kontraktor lokal Papua. Inovasi dan pembelajaran harus selalu dilakukan secara berkala dan fokus

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut bahwa Rerata skor penilaian terhadap deskripsi responden adalah sebesar

2,288 yang di-interpretasikan bahwa nilai tersebut berarti masuk kategori tidak siap dan membutuhkan banyak peningkatan. Artinya adalah bahwa kontraktor lokal Papua tidak (belum) siap menghadapi penerapan sistem pelelangan melalui aplikasi SPSE versi 4, dan untuk menjadi siap maka dibutuhkan banyak peningkatan. Dimana seharusnya nilai minimal dari rerata skor penilaian adalah 3,41 untuk masuk kategori siap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan pendanaan tahun 2018 dalam pelaksanaan penelitian dosen pemula ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hesna, Y., Siregar, S. 2013. Persepsi Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Aanwijzing Elektronik. *Jurnal TeknikA*. Diakses dari <http://ft.unand.ac.id/teknika/TeknikA%20Vol%2020%20No%201%20April%202013-Yervi%20Hesna.pdf> pada tanggal 20 Mei 2017.
- Kuntjojo. 2009. Metodologi Penelitian. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Kurniawan, A. 2014. Pengukuran Tingkat Kesiapan *e-Learning* SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. *Skripsi Prodi Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta*. Diakses dari http://eprints.uny.ac.id/13255/1/SKRIPSI_ARIF_KURNIAWAN_10305144006.pdf pada tanggal 04 Juni 2017.
- Nightisabha, IA., Suhardjanto, D., Cahya, B.T. 2012. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi *Sistem E-Procurement*. *Jurnal Siasat Bisnis*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/83739063/2018-1866-2-PB> pada tanggal 29 Mei 2017.
- Prihastuti, N., E., Adi, T., J., W. 2014. Permasalahan dan Tantangan dalam Peningkatan SDM dan Penyediaan Kesempatan Kerja Bagi Kontraktor Putra Daerah di Propinsi Papua Barat. *Prosiding Semnas Manajemen Teknologi XXII Prodi MMT-ITS*. Diakses dari <http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XXII/MP/17.%20Prosiding%20Nur%20Endah%20P%20Ok.pdf> pada tanggal 1 Juni 2017.
- Priyanto, H. 2012. Permasalahan dan Tantangan dalam Peningkatan SDM dan Penyediaan Kesempatan Kerja Bagi Kontraktor Putra Daerah di Propinsi Papua Barat. *Academia.edu*. Diakses dari https://www.academia.edu/3508981/Tantangan_Peningkatan_SDM_dan_Penyediaan_Kesempatan_Kerja_Bagi_Kontraktor_Putra_Daerah_Papua pada tanggal 20 Mei 2017.
- Priyanto, H. 2013. Naskah Evaluasi Kebijakan Sektor Konstruksi di Propinsi Papua Barat. *Academia.edu*. Diakses dari https://www.academia.edu/5168752/Naskah_Evaluasi_Kebijakan_Sektor_Konstruksi_di_Propinsi_Papua_Barat pada tanggal 20 Mei 2017.
- Priyanto, H. 2014. Tinjauan Kesiapan SDM Konstruksi di Papua Barat dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015. *Academia.edu*. Diakses dari https://www.academia.edu/11032546/Tinjauan_Kesiapan_SDM_Konstruksi_di_Papua_Barat_dalam_Menghadapi_Pasar_Bebas_ASEAN_2015 pada tanggal 20 Mei 2017.
- Saktinegara, P., V. 2013. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah (Analisis Penerapan *e-Procurement* di Lembaga XYZ). *Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum UI*. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334228-T32575-Prista%20Vitali.pdf> pada tanggal 02 Juni 2017.